



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 87 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk dan ditetapkan Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagai berikut :
- a. Facebook : JDIH KPU PABAR (Fanpage);
 - b. Instagram : @jdih_kpu-pabar;
 - c. Twitter : - ; dan
 - d. Youtube : - .
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat berupa informasi yang dimuat dalam JDIH KPU, JDIH KPU Provinsi Papua Barat yang dibutuhkan dukungan platform lain dalam memberikan informasi kepada pembaca mengenai:
- a. Terbitnya suatu produk hukum (Peraturan, Keputusan, dan/atau SE); dan
 - b. Substansi penting dalam produk hukum agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Penyelenggaraan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

Joni Jitmau



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 87 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Facebook (Fanpage)

Nama Pengguna : JDIH KPU PABAR

URL : <http://www.facebook.com/JDIHKUPUPAPUABARAT>

Tampilan :



JDIH KPU PABAR

Posts About Photos Videos ...

Intro

Media Social pendukung Website <https://jdih.kpu.go.id/pabar/>

Page · Government organisation

Jl. Brigjen Abraham O. Atururi Komplek Perkantoran Gubernur Papua Barat, Arfai Kampus Katabu, Manokwari, Indonesia · West Papua

kupupapuabarathukum@gmail.com

jdih.kpu.go.id/pabar

Open now ·

Not yet rated (0 reviews)

Photos

See All Photos

Like Comment Share

JDIH KPU PABAR · 10 mins ago

#Report Jdih Kpu R

KPU Republik Indonesia

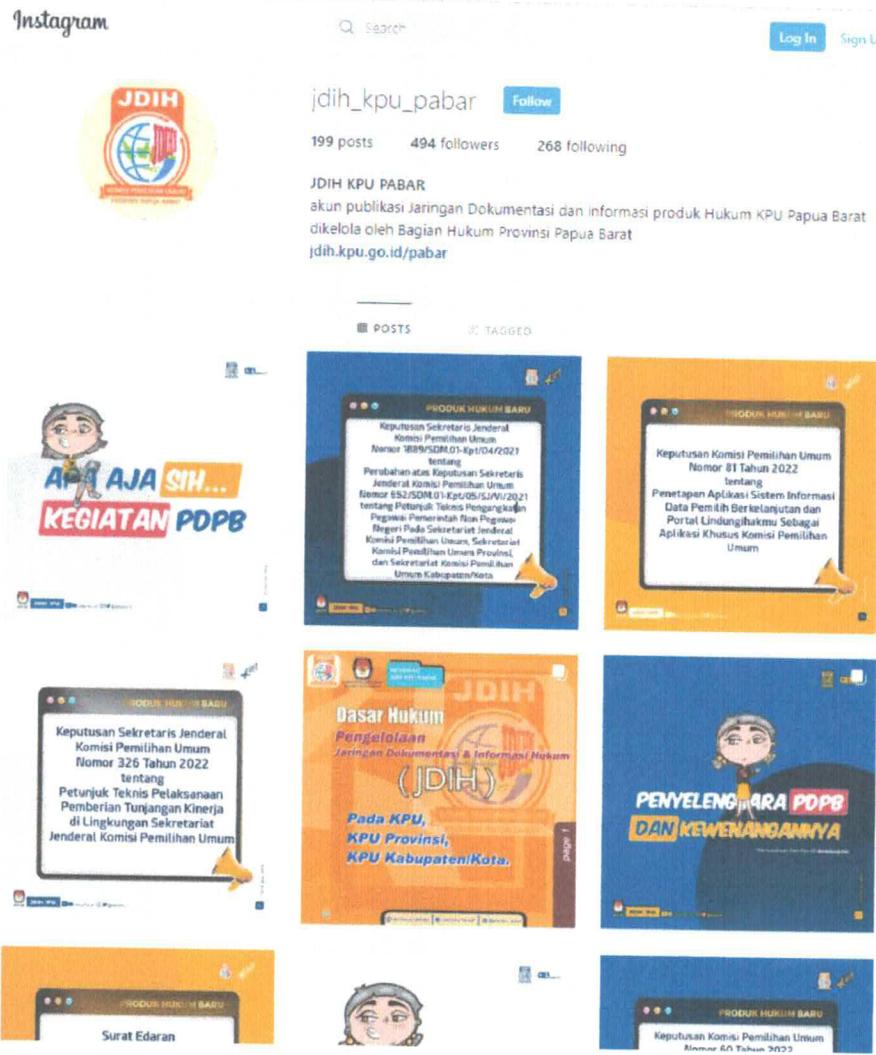
Hai #SobatJDIHKPU, gak terasa ya ini udah serial terakhir serial + ilmu PKPU Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPS). ... See more

Connect with JDIH KPU PABAR on Facebook

[Log In](#) or [Create New Account](#)

B. Instagram

Nama Pengguna : @jdih_kpu_pabar
URL : https://www.instagram.com/jdih_kpu_pabar/
Tampilan :



Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 14 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Penyelenggaraan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

PASKALIS SEMUNYA

